

OMBUDSMAN: PELAYANAN PUBLIK BANTUL BERKUALITAS TINGGI, KEPERCAYAAN WARGA MASIH JADI CATATAN

Kamis, 12 Februari 2026 - diy

BANTUL, iNewsSragen.id - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) secara resmi menyerahkan Opini Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada Pemerintah Kabupaten Bantul, Rabu (11/2/2026). Penyerahan berlangsung di Kantor Bupati Bantul dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Bantul bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY, Muflihul Hadi, menyampaikan bahwa berdasarkan observasi yang dilakukan pada periode September-November 2025, Pemkab Bantul secara umum meraih predikat Kualitas Tinggi (Baik) Tanpa Maladministrasi dengan nilai rata-rata 84,35.

Meski demikian, Ombudsman memberikan catatan penting terkait masih adanya kesenjangan antara kesiapan administrasi pelayanan dengan tingkat kepercayaan masyarakat di lapangan. Menurut Chasidin, kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi juga dari pengalaman langsung masyarakat sebagai pengguna layanan.

Selain penilaian terhadap pemerintah daerah, Ombudsman RI juga melakukan penilaian terhadap lima unit layanan publik di lingkungan Pemkab Bantul. Adapun ringkasan skor penilaian unit layanan tahun 2025 sebagai berikut:

-Dinas Kesehatan: 87,50

-SD Negeri 1 Bantul: 85,82

-Dinas Sosial: 83,92

-Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga: 82,88

-RSUD Panembahan Senopati: 81,63

Dari hasil tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menjadi unit layanan dengan nilai tertinggi. Dinas ini dinilai memiliki kesiapan manajemen yang sangat baik, bahkan meraih nilai sempurna (100 persen) pada aspek kompetensi petugas dan standar operasional prosedur.

Sementara itu, RSUD Panembahan Senopati memperoleh skor terendah di antara lima unit layanan yang dinilai. Ombudsman mencatat masih adanya gap pada dimensi proses pelayanan, khususnya terkait kecepatan layanan yang dinilai masyarakat belum sepenuhnya sesuai harapan.

Di sektor pendidikan, SD Negeri 1 Bantul mencatatkan tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi, yakni 73,58 persen. Hubungan komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan wali murid dinilai menjadi faktor utama, meskipun Ombudsman menilai sistem pengaduan formal di sekolah tersebut masih perlu diperkuat.

Melalui hasil penilaian ini, Ombudsman RI merekomendasikan agar Bupati Bantul tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga segera melakukan restorasi kepercayaan publik. Ombudsman menekankan pentingnya transparansi layanan dan keterbukaan informasi agar masyarakat benar-benar merasakan perubahan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani.

Editor : Joko Piroso